



UNIVERSITAS TEUKU UMAR

JURNAL COMMUNITY: PENGAWAS DINAMIKA SOSIAL

Jl. Alpen Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh

Situs: <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/> , Email: community@utu.ac.id

Aceh Barat, 16 Juli 2025

No : 25/X/JCPDS/2025
Hal : Letter of Acceptance (LoA)

Kepada Yth:

T. Ahyar Chehuna¹, Musdawati², Fatimahsyam³

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Community: Pengawas Dinamika Sosial Terindeks Sinta 4 (ISSN 2502-0544) dengan Judul:

“Kebijakan dan Strategi Partai Nasdem Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan”

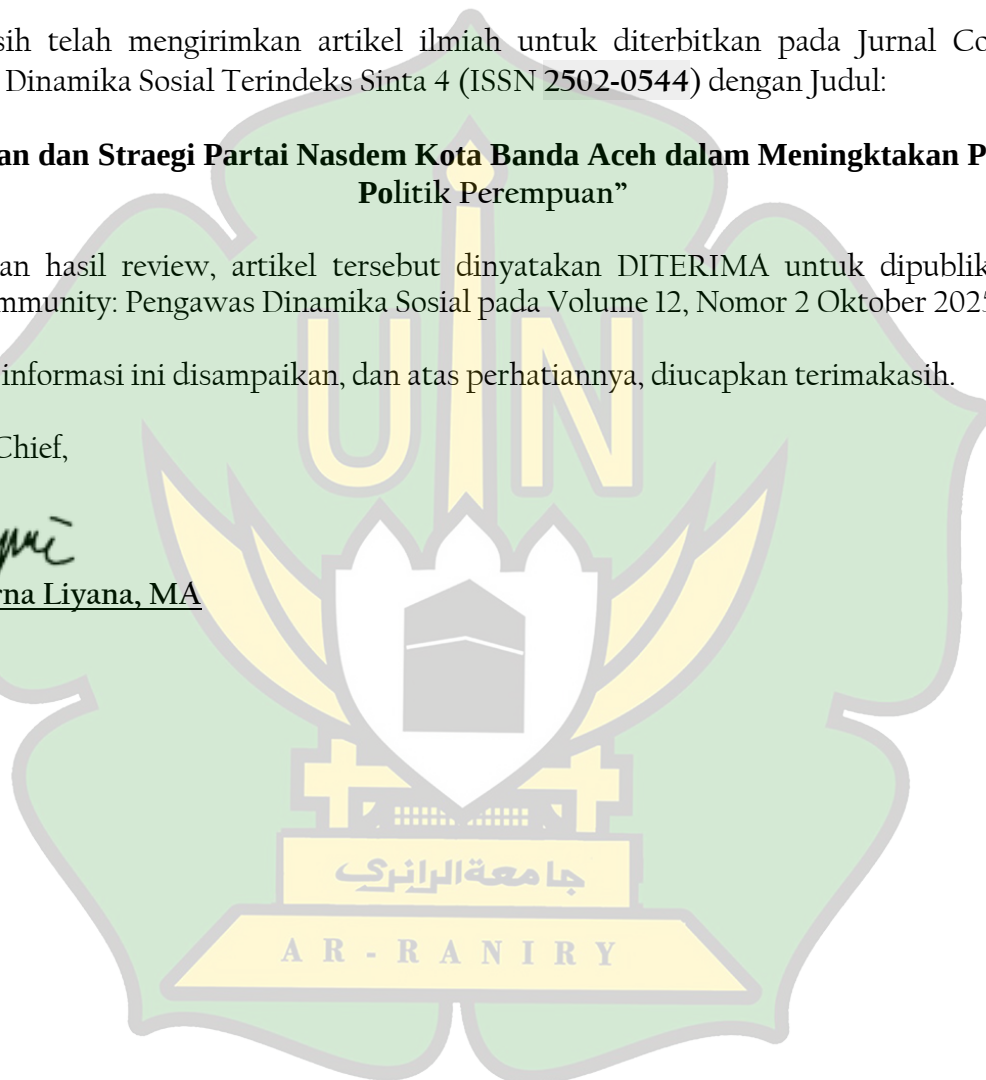
Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal Community: Pengawas Dinamika Sosial pada Volume 12, Nomor 2 Oktober 2025

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Editor in Chief,



Dr. Cut Irna Liyana, MA



KEBIJAKAN DAN STRATEGI PARTAI NASDEM KOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN

T. Ahyar Chehuna, Musdawati, Fatimahsyam

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

210305026@student.ar-raniry.ac.id , Musda.wati@ar-raniry.ac.id , Fatimahsyam@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Permasalahan partisipasi politik perempuan di Aceh masih rendah, partai nasdem berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dan strategi yang dikembangkan oleh partai nasdem kota banda aceh serta tantangan dan hambatan dan hambatan partai nasdem kota banda aceh dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam kebijakan, strategi, serta tantangan dan hambatan partai dalam meningkatkan partisipasi kader perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia politik. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik, partai nasdem membuat kebijakan afirmatif 30% wajib harus ada keterwakilan perempuan di kepengurusan serta dalam pencalonan legislatif dan membangun strategi dengan cara membuka ruang partisipasi perempuan secara lebih luas, meskipun terdapat komitmen formal dalam mendukung keterlibatan politik perempuan, implementasi kebijakan afirmatif dan strategi partisipasi di tubuh partai masih belum optimal. Hambatan struktural lemahnya dukungan internal partai, serta belum terbangunnya sistem pelatihan kepemimpinan yang berkelanjutan menjadi faktor penghambat utama.

Kata kunci: Kebijakan, Strategi, Partai Nasdem, Banda Aceh, Politik Perempuan

A. PENDAHULUAN

Partisipasi politik perempuan di Indonesia telah mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Pada Pemilu Legislatif 2024, sebanyak 127 perempuan terpilih menjadi anggota parlemen, setara dengan 21,90% dari total anggota DPR. Meskipun menunjukkan tren positif, angka ini masih berada di bawah ambang batas 30% yang disarankan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai representasi yang signifikan bagi perempuan dalam pengambilan keputusan politik (Rahmawati, N. E, 2024). Untuk menguatkan pernyataan bahwa partisipasi politik perempuan mengalami peningkatan, berikut data historis keterwakilan perempuan di DPR RI:

Tabel 1. Data Statistik Partisipasi Politik Perempuan di DPR RI
(periode 2014-2024)

Tahun Pemilu	Jumlah Kursi DPR RI	Jumlah Perempuan Terpilih	Persentase (%)
2014	560	97	17,32%
2019	575	120	20,87%
2024	580	127	21,90%

Sumber: KPU RI, diolah dari hasil Pemilu (2014, 2019, 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa partisipasi politik perempuan di Indonesia telah mengalami peningkatan secara bertahap dalam tiga periode pemilu terakhir. Pada Pemilu Legislatif 2014, sebanyak 97 perempuan terpilih menjadi anggota DPR RI dari total 560 kursi, atau sekitar 17,32%. Jumlah ini meningkat pada Pemilu 2019, di mana 120 perempuan berhasil duduk di DPR RI dari total 575 kursi, setara dengan 20,87%. Tren positif ini kembali terlihat dalam Pemilu 2024, dengan 127 perempuan terpilih dari 580 kursi, mencatatkan angka 21,90% keterwakilan perempuan (KPU RI, 2024).

Meskipun secara nasional meningkat, namun di level provinsi Aceh menunjukkan penurunan sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 2. Keterwakilan Perempuan di Legislatif Aceh (periode 2014–2024)

Tahun Pemilu	Jumlah Kursi DPRA	Jumlah Perempuan Terpilih	Persentase (%)
2014	81	12	14,80%
2019	81	9	11,10%
2024	81	7	8,60%

Sumber: (dialeksis.com, 2024).

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa adanya tren penurunan signifikan dalam keterwakilan perempuan di DPR Aceh (DPRA) selama tiga periode pemilu terakhir. Pada Pemilu 2014, perempuan berhasil memperoleh 12 kursi (14,80%), namun jumlah ini turun menjadi 9 kursi (11,10%) pada 2019, dan kembali menurun menjadi 7 kursi (8,60%) pada 2024. Padahal, jumlah bakal calon legislatif perempuan pada Pemilu 2024 tercatat cukup besar, yakni 484 orang dari total 1.387 bacaleg (berbanding 903 laki-laki) yang tersebar di 24 partai politik. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi perempuan sebagai bacaleg cukup tinggi, realisasi keterwakilan di parlemen masih jauh di bawah target kuota 30 persen, yang menunjukkan adanya hambatan struktural, politik, dan budaya dalam proses pencalonan maupun keterpilihan perempuan di Aceh. (dialeksis.com, 2024).

Jika dilihat pada level Kota Banda Aceh maka jumlah partisipasi politik perempuan masih sangatlah rendah sebagaimana pada table berikut.

Tabel 3 Perkembangan Jumlah Kursi DPRK Kota Banda Aceh Partai NasDem (2014–2024)

Tahun Pemilu	Jumlah Kursi NasDem	Jumlah Perempuan Terpilih	Persentase (%)
2014	4	0	0%
2019	3	0	0%
2024	5	1	20%

Sumber: (AJNN, 2014), (AcehTrend, 2019), (DPMG Kota Banda Aceh, 2024).

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pertama, anggota DPRK Banda Aceh periode 2014–2019 ada empat orang yang berasal dari Partai NasDem adalah Ir. M. Ali, Heri Yunus, Abdul Rafur, dan T. Iqbal Djohan (AJNN, 2014). Disini bisa kita lihat, bahwa tidak ada perempuan yang terpilih.

Kedua, anggota DPRK Banda Aceh periode 2019–2024 yang berasal dari Partai NasDem adalah Abdul Rafur, Daniel A. Wahab, S.Pd., dan H. Heri Julius, S.Sos., dengan total sebanyak tiga orang (AcehTrend, 2019). Disini bisa kita lihat, bahwa tidak ada perempuan yang terpilih.

Ketiga, tahun 2024–2029, anggota DPRK Banda Aceh periode 2024–2029 dari Partai NasDem adalah Abdul Rafur, Teuku Nanta Muda S.T., M.M.,

Hj. Efiaty Z A.Md., Teuku Iqbal Djohan S.E., dan Daniel Abdul Wahab, dengan total lima orang (DPMG Kota Banda Aceh, 2024). Disini bisa kita lihat, hanya 1 perempuan yang terpilih yaitu Hj. Efiaty Z A.Md.

Dalam hal ini, Partai NasDem Kota Banda Aceh sebagai partai politik yang aktif di wilayah tersebut memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan. Melalui berbagai kebijakan afirmatif, strategi rekrutmen kader perempuan, serta pelatihan kepemimpinan politik, partai ini berpotensi menjadi agen perubahan dalam memperkuat posisi perempuan di arena politik lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi, kebijakan, tantangan dan hambatan Partai NasDem Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Secara khusus, studi ini ingin mengidentifikasi:

- 1) Kebijakan partai terhadap keterlibatan perempuan dalam politik.
- 2) Strategi partai dalam mendorong perempuan untuk menjadi calon legislatif.
- 3) Tantangan dan hambatan dalam mendorong keterwakilan perempuan.

Diharapkan, hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana politik gender di tingkat lokal, serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan afirmatif dan strategi rekrutmen politik perempuan di partai-partai lain.

Berdasarkan telaah awal terhadap data partisipasi politik perempuan yang terjadi di Kota Banda Aceh, peneliti menyimpulkan bahwa rendahnya partisipasi politik perempuan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor budaya patriarki atau keterbatasan kapasitas individu perempuan, tetapi lebih disebabkan oleh minimnya kebijakan afirmatif yang berpihak pada perempuan serta lemahnya strategi partai politik dalam melakukan kaderisasi dan pemberdayaan politik perempuan.

Dalam hal ini, Partai NasDem Banda Aceh belum sepenuhnya mengoptimalkan peran struktural partai dalam membuka ruang partisipasi yang setara bagi perempuan, baik dalam hal pencalonan legislatif, pengambilan keputusan partai, maupun pembinaan kader. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan apakah benar partisipasi politik perempuan yang rendah disebabkan oleh absennya kebijakan yang

mendukung dan lemahnya strategi internal partai, khususnya di tubuh Partai NasDem Kota Banda Aceh.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Politik Dan Gender

Politik merupakan proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, termasuk distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam suatu negara atau komunitas (Munte, 2021). Sementara itu, gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang membedakan peran, tanggung jawab, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (Mandasari, 2023). Perbedaan ini bukan semata-mata berdasarkan biologis, melainkan hasil dari norma dan nilai yang berkembang dalam suatu budaya (Wardana & Magriasti, 2024).

Dalam hal politik, hubungan antara politik dan gender menyoroti bagaimana peran dan representasi perempuan dalam proses politik seringkali dipengaruhi oleh norma-norma gender yang ada (Aula, 2023). Hal ini terdiri atas akses perempuan terhadap posisi kekuasaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta keterwakilan dalam lembaga-lembaga politik (Amalia, 2023).

Salah satu teori yang relevan dalam membahas keterlibatan perempuan dalam politik adalah teori representasi politik yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin. Pitkin membedakan antara representasi deskriptif dan representasi substantive (Suci dan Hertanto, 2024). Teori representasi politik menurut Hanna Pitkin menjelaskan bahwa adalah perempuan dalam politik tidak hanya dapat dilihat dari jumlah kursi yang mereka peroleh di lembaga legislatif, tetapi juga dari sejauh mana kepentingan mereka benar-benar diperjuangkan dalam proses politik (Niron, E. S., & Seda, A. B, 2020). Pitkin membedakan antara representasi deskriptif dan representasi substantif. Representasi deskriptif berkaitan dengan sejauh mana lembaga politik menunjukkan komposisi demografis masyarakat, termasuk adanya keterwakilan perempuan sebagai wujud keadilan dalam perwakilan formal (Pratiwi, A. M, 2021). Kemudian, representasi substantif adalah sejauh mana aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan perempuan diartikulasikan serta diperjuangkan dalam kebijakan politik, terlepas dari banyaknya jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi legislatif (Waruwu, F. J. D. B, 2024). Di Indonesia, meskipun kebijakan kuota 30% untuk calon legislatif perempuan telah diberlakukan,

masih terdapat tantangan dalam mewujudkan representasi substantif. Hambatan tersebut karena kuatnya budaya patriarki, lemahnya dukungan dari partai politik, serta berbagai kendala struktural yang membuat suara dan kepentingan perempuan sering kali belum terakomodasi secara optimal dalam pengambilan keputusan politik (Hanasi, R. A, 2025).

b. Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia dan Aceh

Partisipasi politik perempuan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi, ditandai dengan penerapan kebijakan afirmatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (Aula, 2023). Namun, meskipun kebijakan ini telah diterapkan, representasi perempuan dalam lembaga legislatif masih belum mencapai target yang diharapkan (Mandasari, 2023). Pada periode 2024–2029, keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 22%, meningkat dari periode sebelumnya, namun masih di bawah target afirmatif (Amalia, 2023).

Partisipasi politik perempuan di Indonesia memang alami peningkatan yang konsisten dalam tiga periode pemilu terakhir. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Pemilu 2014 terdapat 97 perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI dari total 560 kursi atau 17,32%. Jumlah ini meningkat menjadi 120 orang dari 575 kursi pada Pemilu 2019 dengan persentase 20,87%, dan kembali naik menjadi 127 orang dari 580 kursi pada Pemilu 2024, setara dengan 21,90% keterwakilan perempuan (KPU RI, 2024).

Meskipun terdapat kemajuan, angka tersebut masih jauh dari target 30% kuota keterwakilan perempuan yang diatur dalam kebijakan afirmasi. Hal ini menegaskan bahwa perempuan di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti dominasi laki-laki dalam kepemimpinan partai politik, keterbatasan akses sumber daya, serta kurangnya dukungan terhadap isu gender dalam agenda legislatif. Oleh karena itu, peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen perlu dibarengi dengan upaya penguatan representasi substantif, agar keberadaan mereka tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga berpengaruh pada pengambilan keputusan politik (Waruwu, 2024).

Berbeda dengan tren nasional, keterwakilan politik perempuan di Aceh justru mengalami penurunan signifikan dalam tiga periode pemilu terakhir. Pada Pemilu 2014, terdapat 12 perempuan yang berhasil menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atau 14,80%. Namun, jumlah tersebut menurun menjadi 9 orang (11,10%) pada Pemilu 2019, dan semakin

menurun menjadi hanya 7 orang (8,60%) pada Pemilu 2024 (dialeksis.com, 2024).

Padahal, jumlah bakal calon legislatif (bacaleg) perempuan pada Pemilu 2024 cukup besar, yakni 484 orang dari total 1.387 bacaleg. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya partisipasi perempuan dalam pencalonan dengan rendahnya keterpilihan di parlemen. Faktor budaya patriarki, dominasi laki-laki dalam partai politik, serta hambatan struktural lainnya menjadi penyebab utama rendahnya keterwakilan perempuan di Aceh, sehingga target kuota 30% masih jauh dari tercapai (Asrina *et al*, 2024).

Keterwakilan politik perempuan di Banda Aceh, khususnya melalui Partai NasDem, menunjukkan kondisi yang relatif stagnan pada dua periode pemilu sebelumnya. Pada periode 2014–2019, Partai NasDem memperoleh empat kursi DPRK Banda Aceh, namun semuanya diisi oleh laki-laki, yaitu Ir. M. Ali, Heri Yunus, Abdul Rafur, dan T. Iqbal Djohan (AJNN, 2014). Hal yang sama terjadi pada periode 2019–2024, ketika tiga kursi NasDem kembali ditempati oleh laki-laki, yakni Abdul Rafur, Daniel A. Wahab, S.Pd., dan H. Heri Julius, S.Sos. (AcehTrend, 2019).

Kemudian pada Pemilu 2024 terdapat perkembangan, dengan terpilihnya Hj. Efiaty Z A.Md. sebagai satu-satunya perempuan dari lima kursi yang diperoleh Partai NasDem, setara dengan 20% keterwakilan (DPMG Kota Banda Aceh, 2024). Meskipun jumlah ini masih sangat kecil, capaian tersebut dapat menjadi harapan bagi peningkatan partisipasi politik perempuan di tingkat legislatif kota (Anang *et al*, 2025). Namun, untuk mencapai representasi yang lebih seimbang, Ayu *et al* menjelaskan bahwa ini perlu strategi afirmasi yang lebih kuat dari partai politik serta dukungan masyarakat agar perempuan tidak hanya menjadi pemenuhan kuota, tetapi juga memiliki peran substantif dalam pembuatan kebijakan (Ayu *et al*, 2025).

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik perempuan meliputi hambatan struktural dalam partai politik, budaya patriarki yang masih kuat, serta kurangnya akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi (Aula, 2023). Selain itu, stereotip gender dan beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja menjadi kendala signifikan (Ramadhanty & Naila, 2024).

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik perempuan di Indonesia terdiri dari Budaya Patriarki yaitu Norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan pengambil keputusan utama,

sehingga membatasi peran perempuan dalam politik. (Amalia, 2023). Ada hambatan Struktural yaitu kurangnya akses perempuan terhadap sumber daya politik, pendidikan, dan jaringan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam politik (Wardana & Magriasti, 2024).

Kurangnya Dukungan Partai Politik: Partai politik seringkali tidak memberikan dukungan yang memadai bagi calon legislatif perempuan, baik dalam hal pendanaan maupun pelatihan (Oktarina & Putra, 2021).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi perempuan (Ramadhanty & Naila, 2024).

c. Strategi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan

Partai politik diperlukan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui berbagai strategi (Mandasari, 2023). Kaderisasi dan Pelatihan Kepemimpinan pada partai politik menyediakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk calon legislatif perempuan guna meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri mereka dalam berpolitik (Amalia, 2023). Penempatan dalam Posisi Strategis mendorong penempatan perempuan dalam posisi strategis dalam struktur partai dan daftar calon legislatif untuk meningkatkan peluang mereka terpilih (Yuniarti, Riswandi, & Finthariasari, 2021). Pendidikan Politik dan Kesadaran Gender melaksanakan program pendidikan politik yang sensitif gender untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam politik (Kumalasari & Rosyida, 2022). Advokasi dan Aliansi membangun aliansi dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok perempuan untuk memperkuat advokasi terhadap isu-isu gender dalam politik (Oktarina & Putra, 2021).

Berdasarkan strategi-strategi tersebut oleh Partai NasDem di Kota Banda Aceh bisa menjadi fokus utama dalam penelitian ini untuk memahami efektivitas pendekatan partai dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di tingkat lokal.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menggali secara rinci

kebijakan dan strategi Partai NasDem dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, karena penelitian difokuskan pada satu hal spesifik, yakni peran Partai NasDem Kota Banda Aceh dalam mendorong keterlibatan politik perempuan.

Subjek penelitian adalah pengurus Partai NasDem Kota Banda Aceh dan anggota legislatif perempuan dari Partai NasDem. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah enam orang, yaitu HHJ (Ketua DPD Partai NasDem Kota Banda Aceh), TWQ (Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan), HE (Anggota DPRK Banda Aceh terpilih), ISL (Wakil Sekretaris Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis), YS (Pengurus Garnita Malahayati), dan MW (Ketua DPC Banda Raya).

Tabel 4 Subjek Penelitian

Inisial	Jabatan
HHJ	Ketua DPD Partai NasDem Kota Banda Aceh
TWQ	Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan
HE	Anggota DPRK Banda Aceh terpilih
ISL	Wakil Sekretaris Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis
YS	Pengurus Garnita Malahayati
MW	Ketua DPC Banda Raya

Teknik pengumpulan data primernya dilakukan melalui wawancara (interview) untuk memperoleh informasi yang detail dari setiap informan (Munte, 2021), observasi partisipatif yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan internal partai seperti rapat pengurus, pertemuan anggota, dan aktivitas sosial partai (Amalia, 2023), serta untuk data sekunder, dilakukan pengumpulan dokumentasi yang terdiri atas pengumpulan arsip, foto, dan dokumen resmi dari partai (Kartikasari, Wati, & Soma, 2023).

Adapun data sekundernya yaitu:

1. Peraturan Partai NasDem Nomor 1 Tahun 2025
2. Peraturan Partai NasDem Nomor 4 Tahun 2022
3. Program Akademi Perempuan NasDem (28 Februari 2025)
4. Surat Undangan Nomor: 211-Und/DPP-NasDem/IV/2025
5. Surat Undangan Nomor: 198/Und/DPP-NasDem/III/2025
6. Pernyataan Surya Paloh dalam Simposium Perempuan Kongres III Partai NasDem (2022)

Lokasi penelitian berada di Sekretariat DPD Partai NasDem Kota Banda Aceh yang beralamat di Jalan Tengku Dibrang No. 71, Rumah Putih, Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, D.I. Aceh, Indonesia.

D. PEMBAHASAN

Kebijakan Berdasarkan Data Primer (Hasil Wawancara) adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan dan Strategi Partai NasDem Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan

Berdasarkan visi Partai NasDem, yakni mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya, serta misi membangun politik demokratis berkeadilan, menciptakan demokrasi ekonomi, dan menjadikan gotong royong sebagai karakter bangsa (DPW Partai NasDem Aceh, 2025), kebijakan serta strategi yang diambil oleh Partai NasDem Kota Banda Aceh telah diarahkan untuk membuka ruang partisipasi perempuan secara lebih luas. Seluruh kebijakan ini diterapkan melalui prinsip Restorasi Indonesia yang menjadi napas perjuangan partai.

Ini sejalan dengan hasil wawancara dengan enam informan, HHJ, TWQ, Hj. E. F., ISL, YS, dan MW yang menunjukkan bahwa NasDem Banda Aceh konsisten menjalankan kebijakan afirmasi minimal 30% keterwakilan perempuan baik di kepengurusan maupun dalam pencalonan legislatif. Ketua DPD, HHJ, menegaskan bahwa:

“NasDem sebagai partai yang progresif dan terbuka menerapkan strategi rekrutmen yang inklusif dan bebas dari mahar, sehingga memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk bergabung dan berkontribusi” (HHJ, 2025).

Pernyataan ini sejalan dengan misi partai dalam membangun politik demokratis yang membuka akses partisipasi rakyat secara menyeluruh.

Strategi peningkatan kapasitas kader penting. HHJ menjelaskan bahwa partai rutin mengadakan pelatihan kepemimpinan, komunikasi politik, workshop isu gender, hingga pendampingan bagi kader perempuan yang maju sebagai caleg.

Upaya ini dipertegas oleh TWQ yang menyatakan:

“strategi utama adalah melibatkan perempuan dalam setiap tingkatan struktur, termasuk di posisi ketua, sekretaris, atau bendahara. Tanpa kehadiran perempuan, struktur belum bisa difinalisasi” (TWQ, 2025).

Pendekatan personal terbukti efektif. YS menjelaskan metode perekrutan anggota tim pemenang melalui interaksi santai di desa, lalu membangun struktur yang solid.

YS menjelaskan:

“Loyalitas tim perempuan itu tinggi. Walau ada tawaran dari partai lain, mereka tetap bertahan karena sudah percaya” (YS, 2025). Pendekatan ini selaras dengan strategi partai untuk membangun basis dukungan berbasis komunitas dan kultural.

Faktor finansial menjadi penghalang serius. ISL menjelaskan bahwa banyak caleg perempuan

ISL mengatakan:

“Tidak memiliki dukungan finansial memadai sehingga kalah bersaing dengan caleg laki-laki” (ISL, 2025).

Partai NasDem memanfaatkan organisasi sayap perempuan Garnita Malahayati sebagai media pemberdayaan.

Hj. E. F. menuturkan:

“Garnita mengadakan kegiatan sosial seperti peringatan Hari Kartini, Hari Ibu, hingga pelatihan yang melibatkan ibu-ibu, agar mereka lebih percaya diri tampil di depan publik” (Hj. E. F., 2025).

Hal ini membuktikan integrasi nilai gotong royong dalam misi partai, di mana keterlibatan perempuan dilihat sebagai kekuatan kolektif yang harus dipupuk.

Kemudian, MW menambahkan dimensi ekonomi sebagai strategi politik. Melalui program pasar murah, bantuan UMKM, beasiswa, hingga tabung gas gratis, partai berusaha meringankan beban pemilih perempuan.

MW menjelaskan:

“Perempuan di partai ini bukan hanya ikut politik, tapi menguatkan ekonomi keluarga” (MW, 2025).

Kebijakan ini mencerminkan misi kedua NasDem, yakni menciptakan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak ringan. Hambatan kultural berupa pandangan patriarkis masih kuat, di mana politik dianggap ranah laki-laki.

Hj. E. F., menjelaskan:

“Ada anggapan bahwa perempuan hanya cocok di belakang laki-laki, bahkan sesama perempuan kadang saling menjatuhkan karena terpengaruh pandangan patriarki” (Hj. E. F., 2025).

Karena hal inilah maka, bisa disimpulkan bahwa kebijakan dan strategi Partai NasDem Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan telah terdiri atas tiga aspek yaitu (1) penegakan kuota afirmasi 30% keterwakilan perempuan, (2) peningkatan kapasitas dan kepemimpinan melalui pelatihan dan pendampingan, serta (3) integrasi pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui organisasi sayap. Seluruh strategi ini berasal dari visi-misi partai, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tantangan struktural, kultural, dan finansial yang memerlukan terobosan lebih lanjut.

b. Strategi dan Kebijakan Internal Partai

Strategi internal Partai NasDem Kota Banda Aceh dalam mendorong keterlibatan perempuan berakar pada prinsip inklusivitas dan pemberdayaan. Penegakan kuota afirmasi 30% keterwakilan perempuan menjadi pijakan utama yang diikuti dengan rekrutmen terbuka dan bebas mahar, sehingga membuka peluang yang setara bagi semua kalangan perempuan untuk berpartisipasi (HHJ, wawancara, 2025). Upaya ini diperkuat melalui pelatihan kepemimpinan, komunikasi politik, serta pembekalan isu gender agar kader perempuan siap bersaing dalam proses politik (TWQ, wawancara, 2025). Pembinaan dilakukan melalui organisasi sayap perempuan Garnita Malahayati, yang menjadi wadah penguatan kapasitas dan jaringan politik (Hj. E. F., wawancara, 2025). Selain itu, partai menjalankan program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang relevan dengan kebutuhan konstituen perempuan, seperti pasar murah, bantuan usaha mikro, dan pelatihan

keterampilan, sehingga keterlibatan perempuan tidak hanya di ranah politik, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi keluarga (MW, wawancara, 2025).

c. Tantangan dan Hambatan

Pelaksanaan strategi Partai NasDem Kota Banda Aceh tidak terlepas dari berbagai tantangan. Hambatan kultural menjadi faktor dominan, di mana pandangan patriarkis masih mengakar kuat dalam masyarakat, memposisikan politik sebagai wilayah yang lebih layak diisi laki-laki (Hj. E. F., wawancara, 2025). Kendala finansial juga menjadi penghalang signifikan bagi calon legislatif perempuan, yang sering kali kalah bersaing dengan kandidat laki-laki yang memiliki sumber daya lebih besar (ISL, wawancara, 2025). Keterbatasan hasil representasi deskriptif terlihat dari jumlah legislator perempuan yang belum mengalami peningkatan berarti, meskipun kebijakan afirmasi telah diterapkan. Selain itu, menjaga keberlanjutan dukungan menjadi tantangan tersendiri di tengah persaingan politik yang semakin kompetitif antarpartai (YS, wawancara, 2025). Widiyaningrum menjelaskan bahwa kondisi ini memperlihatkan bahwa selain strategi dari dalam, dibutuhkan juga perubahan aturan dan budaya yang lebih luas agar keterlibatan perempuan dalam politik bisa terus berjalan dan memberi hasil nyata (Widiyaningrum, W. Y, 2022).

d. Kebijakan dan Strategi Resmi Partai

Kebijakan Berdasarkan Data Sekunder (Dokumen Resmi Partai) adalah sebagai berikut:

Selain dari hasil wawancara, kebijakan Partai NasDem soal partisipasi politik perempuan juga ada di dokumen resmi partai yang ditandatangani langsung oleh pengurus pusat, sehingga makin kuat dan jelas arah kebijakannya.

1. Keterwakilan Perempuan 30% dalam Struktur Partai

Dalam *Peraturan Partai NasDem Nomor 1 Tahun 2025* tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa "struktur dan komposisi kepengurusan Partai NasDem wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30%" (Peraturan Partai NasDem No. 1 Tahun 2025, Pasal 2 ayat 2). Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan perempuan sudah menjadi mandat resmi partai.

2. Politik Tanpa Mahar

Peraturan yang sama pada Bab II Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa "seluruh tahapan pembentukan struktur organisasi Partai NasDem dilakukan tanpa mahar" (Peraturan Partai NasDem No. 1 Tahun 2025, Pasal 4 ayat 1). Ketentuan ini diperkuat oleh *Peraturan Partai NasDem Nomor 4 Tahun 2022* tentang Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Pasal 10 yang menegaskan bahwa penjurangan bacaleg, caleg, dan paslon kepala daerah dilakukan tanpa pungutan (Peraturan Partai NasDem No. 4 Tahun 2022, Pasal 10).

3. Penjurangan Caleg Perempuan

Masih dalam *Peraturan Partai NasDem Nomor 4 Tahun 2022*, pada Pasal 15 ayat (5) ditegaskan bahwa Bappilu wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam proses penjurangan bakal caleg (Peraturan Partai NasDem No. 4 Tahun 2022, Pasal 15 ayat 5).

4. Strategi Berdasarkan Dokumen Resmi

Selain kebijakan tertulis, strategi konkret Partai NasDem dalam mendorong partisipasi perempuan juga ditunjukkan melalui program dan kegiatan resmi. Seperti:

a. Akademi Perempuan NasDem

Diluncurkan secara resmi oleh Ketua Umum Surya Paloh pada 28 Februari 2025, program ini menjadi wadah kaderisasi dan pelatihan politik bagi perempuan (Fachri Audhia Hafiez, 2025). Surya Paloh mengungkapkan bahwa perempuan adalah pilar penting partai dan bahkan membuka kemungkinan partai dipimpin oleh perempuan (ABN NasDem, 2022).

b. Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

Berdasarkan Undangan Nomor: 211-Und/DPP-NasDem/IV/2025, DPP Partai NasDem secara rutin menyelenggarakan *Kelas Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan* bekerja sama dengan Garnita Malahayati. Kegiatan ini berlangsung tiap bulan dan membahas isu seperti feminisme Pancasila, advokasi kebijakan inklusif, serta strategi komunikasi politik. TOR kegiatan ini tujuan penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan agar lebih efektif dan transformatif. (DPP NasDem, 2025).

c. Pelatihan Kepemimpinan Perempuan yang Efektif dalam Politik Lokal

Surat Undangan Nomor: 198/Und/DPP-NasDem/III/2025 menunjukkan adanya pelatihan nasional bertema *Kepemimpinan Perempuan yang Efektif dalam Politik Lokal*. TOR pelatihan ini memuat tujuan untuk mengidentifikasi hambatan politik perempuan, membangun strategi advokasi, serta meningkatkan keterampilan lobi dan negosiasi (DPP NasDem, 2025).

E. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan strategi Partai NasDem Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian, bisa disimpulkan bahwa strategi dan kebijakan partai telah selaras dengan visi “mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya” serta misi membangun politik demokratis berkeadilan, menciptakan demokrasi ekonomi, dan menjadikan gotong royong sebagai karakter bangsa. Partai NasDem Kota Banda Aceh menerapkan kebijakan afirmasi minimal 30% keterwakilan perempuan, baik di struktur kepengurusan maupun dalam pencalonan legislatif. Strategi yang diterapkan terdiri atas rekrutmen inklusif bebas mahar, pelatihan kepemimpinan dan isu gender, pembinaan kader, pemberdayaan ekonomi melalui program sosial, serta pemanfaatan organisasi sayap perempuan seperti Garnita Malahayati. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi representasi deskriptif sekaligus substantif, sebagaimana dijelaskan dalam teori representasi politik Hanna Pitkin. Namun, efektivitas strategi tersebut masih dipengaruhi oleh hambatan kultural berupa pandangan patriarkis yang membatasi ruang gerak perempuan, serta kendala finansial yang membuat persaingan politik menjadi tidak seimbang. Data perolehan kursi DPRK Kota Banda Aceh menunjukkan tren fluktuatif, di mana keterwakilan perempuan di legislatif belum mengalami peningkatan signifikan meskipun kebijakan afirmasi telah dijalankan.

Kalau kita melihat hasil dari data primer dan sekunder, bisa dilihat jelas bahwa Partai NasDem terus mendorong partisipasi politik perempuan. Pertama, ada aturan resmi partai yang mewajibkan kuota 30% untuk perempuan, melarang adanya politik mahar, dan juga memberi dukungan lewat program kaderisasi serta pelatihan. Kedua, ada langkah nyata di lapangan yang dilakukan di Kota Banda Aceh, seperti merekrut lewat komunitas, mendorong usaha ekonomi, sampai memperkuat peran organisasi sayap perempuan. Jadi, aturan tertulis yang dipadukan dengan program nyata ini menunjukkan kalau komitmen Partai NasDem untuk meningkatkan peran perempuan di dunia politik bukan hanya sekadar omongan, tapi benar-benar diwujudkan lewat dokumen resmi dan kegiatan yang berjangka panjang. Ini berarti, Surya Paloh selaku pimpinan tertinggi Partai NasDem selalu menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat dan menjunjung tinggi peran perempuan di Partai NasDem.

